

JAKARTA PASCA-IKN: TRANSFORMASI MENUJU KOTA GLOBAL BERBASIS KETAHANAN KELUARGA

Oleh: Al Mujizat

Komite Ahli Pokja 3, Bidang Kajian Pembangunan Kota, Permukiman dan Indrastuktur
(Pemerhati Keberlanjutan, Founder Shared Value Indonesia)

Jakarta saat ini sedang menjalani rekayasa ulang sosiopolitik paling fundamental sejak proklamasi 1945. Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menandai berakhirnya era Jakarta sebagai pusat birokrasi pemerintahan pusat. Peralihan kedudukan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara bukanlah sebuah degradasi, melainkan sebuah "pelepasan beban" yang memungkinkan Jakarta untuk mendefinisikan dirinya kembali sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

Ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,21% pada periode terakhir. Jakarta tetap menjadi kontributor utama PDB nasional (di atas 15%), membuktikan bahwa perpindahan Ibu Kota ke IKN tidak menyurutkan perannya sebagai pusat finansial.

Integrasi Transportasi Skala Dunia. Menyatukan lima moda transportasi (MRT, LRT, KRL, Kereta Bandara, dan TransJakarta) dalam satu kawasan integrasi pedestrian.

Tingkat literasi digital dan volume transaksi non-tunai di Jakarta adalah yang tertinggi di Indonesia. Velositas pembayaran digital telah mencapai angka 1,25, yang mendorong efisiensi bisnis skala UMKM hingga korporasi besar.

Di balik kemajuan fisik, terdapat data-data yang menunjukkan tantangan mendasar yang belum terselesaikan. Jakarta kembali masuk dalam 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Konsentrasi PM2.5 seringkali berada di kategori "Tidak Sehat", yang berdampak pada peningkatan kasus ISPA dan beban biaya kesehatan keluarga.

Harga properti formal yang tidak rasional bagi pekerja berpenghasilan rendah memicu fenomena "hunian informal". Data lapangan menunjukkan munculnya kembali pemukiman terpal dan rumah gerobak di celah-celah kota sebagai strategi bertahan hidup warga yang terjepit biaya sewa.

Penurunan muka tanah tetap terjadi dengan laju 1-15 cm per tahun di titik-titik kritis Jakarta Utara. Meski proyek Giant Sea Wall mulai dimatangkan kembali oleh pemerintah pusat dan daerah, ancaman banjir rob tetap menghantui kawasan pesisir setiap bulannya.

BPS DKI Jakarta mencatat penurunan angka kemiskinan pada September 2025 menjadi 4,03% (439.120 orang), turun dari 4,28% pada Maret 2025. Terendah pascapandemi,

meski belum sepenuhnya pulih ke level semula. Mengingat rata-rata rumah tangga miskin memiliki lima anggota, pengeluaran minimum keluarga mencapai Rp4,57 juta per bulan.

Data Bank Dunia dengan standar negara pendapatan menengah atas (\$8.30) menunjukkan bahwa hampir setengah dari warga Jakarta masih berada di posisi rentan secara finansial—mereka memiliki pekerjaan, namun tidak memiliki bantalan ekonomi saat terjadi guncangan harga pangan.

Belajar dari Dunia: Resiliensi Kota Pasca-Status Ibu Kota

Sejarah mencatat bahwa kota lama yang ditinggalkan status ibu kotanya justru sering kali tumbuh menjadi pusat ekonomi yang lebih efisien dan manusiawi. Pertumbuhan ini ditentukan oleh kemampuan kota tersebut dalam mengelola sumber daya manusianya.

1. **Rio de Janeiro, Brasil (Pindah ke Brasilia, 1G60):** Rio berhasil melakukan *re-branding* sebagai pusat pariwisata dunia dan industri kreatif setelah tidak lagi memikul beban birokrasi. Keberhasilannya terletak pada optimalisasi aset budaya dan sosial.
2. **Lagos, Nigeria (Pindah ke Abuja, 1GG1):** Lagos tumbuh menjadi pusat keuangan dan teknologi terbesar di Afrika. Pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi memberikan ruang bagi sektor swasta untuk tumbuh tanpa hambatan birokrasi yang kaku.
3. **Almaty, Kazakhstan (Pindah ke Astana, 1GG7):** Almaty tetap menjadi jantung budaya dan sains, membuktikan bahwa identitas kota melekat pada kualitas hidup warganya, bukan pada kehadiran istana presiden.

Ketiga kota ini membuktikan bahwa pelepasan status ibu kota adalah "kemerdekaan" untuk fokus pada pembangunan manusia. Jakarta memiliki peluang serupa untuk bertransformasi menjadi pusat peradaban yang berbasis pada unit terkecil masyarakat: keluarga.

Paradigma Baru: Negara yang Menghidupkan Keluarga

Menuju Kota Global, Jakarta harus berani mengambil langkah radikal: menetapkan prinsip bahwa tidak boleh ada satu pun kepala keluarga yang menganggur. Prinsip ini mengubah arah kebijakan sosial dari sekadar pemberian bantuan menjadi jaminan kerja. Negara tidak lagi cukup menjadi pengamat pasar tenaga kerja, tetapi harus menjadi penggerak dan penghubung kehidupan.

Kepala keluarga tidak selalu berarti suami; posisi ini bisa diisi oleh istri, janda, atau anggota keluarga lain yang cukup umur untuk menanggung tanggung jawab ekonomi. Siapa pun yang menjadi penopang utama harus diprioritaskan untuk bekerja karena mereka adalah fondasi pertama yang menjaga keutuhan keluarga.

Pemerintah sebenarnya memiliki data lengkap mengenai profil setiap kepala keluarga, domisili, hingga jumlah tanggungan. Namun, selama ini data tersebut hanya berhenti sebagai deretan angka yang dingin dan tanpa makna. Untuk menghidupkan keluarga, sistem pemantauan harus berbasis *real-time*. Monitoring ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendampingi agar negara hadir saat rakyatnya merasa lelah.

Ketika negara gagal menjamin penghidupan, pasar akan mengambil alih, bahkan atas tubuh manusia itu sendiri melalui prostitusi dan eksploitasi. Kemiskinan dan komersialisasi tubuh adalah dua sisi dari koin yang sama. Fenomena ini bukan sekadar persoalan moral, melainkan persoalan ekonomi dan keputusan. Dengan memastikan setiap kepala keluarga bekerja, kita mencabut akar masalah eksploitasi tersebut.

Penghidupan ekonomi tidak akan cukup tanpa bimbingan moral. Kepala keluarga harus dipandang bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik pertama dalam kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu, negara wajib memastikan setiap kepala keluarga mendapatkan pemahaman mengenai etika dan pendidikan keluarga.

- **Pelatihan Parenting dan Etika:** Pendidikan moral dan keterampilan menjadi orang tua harus menjadi bagian dari kebijakan sosial. Pelatihan ini dapat dilakukan di tingkat komunitas, balai desa, atau melalui lembaga keagamaan.
- **Materi Pendidikan:** Fokus pendidikan mencakup cara berkomunikasi dengan anak, membangun disiplin, menanamkan nilai kerja keras, dan menjauhkan anak dari gaya hidup instan.
- **Dampak Sosial:** Keluarga yang terdidik secara moral akan melahirkan generasi yang kuat secara nilai dan tidak mudah terjerumus pada materialisme jalan pintas. Ini adalah benteng utama Jakarta dalam menghadapi masalah perkotaan seperti tawuran, narkoba, dan kriminalitas remaja.

Enam Pilar Menghidupkan Kota

Standar ISO 37101 - *Management System for Sustainable development in communities*- memberikan kerangka kerja bagi Jakarta untuk mengintegrasikan filosofi "Menghidupkan Keluarga" ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

1. Daya Tarik (Attractiveness)

Jakarta tidak akan menarik bagi talenta global jika tingkat kriminalitasnya tinggi. Kriminalitas sering kali berakar dari pengangguran kepala keluarga yang kehilangan martabat. Dengan memastikan setiap penopang keluarga bekerja, kita menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat, yang secara alami akan menarik investasi dunia.

2. Ketahanan (Resilience)

Ketahanan kota dimulai dari ketahanan unit terkecilnya. Jika keluarga mandiri secara ekonomi dan memiliki fondasi moral yang kuat, mereka akan lebih resilien menghadapi guncangan ekonomi global. Keluarga yang kuat adalah benteng pertahanan pertama kota terhadap krisis sosial maupun ekonomi.

3. Kohesi Sosial (Social Cohesion)

Kesalahan struktural selama ini adalah memaksa rakyat miskin meninggalkan rumah demi mencari kerja, yang menyebabkan keterasingan dan retaknya keluarga. Strategi Jakarta pasca-IKN harus memprioritaskan penempatan kerja yang dekat dengan tempat tinggal. Pekerjaan berbasis komunitas atau wilayah lokal harus menjadi prioritas agar orang tua memiliki lebih banyak waktu untuk mencintai dan mendidik anak-anaknya. Cinta adalah energi sosial yang tak tergantikan oleh uang.

4. Kesejahteraan (Well-being)

Kesejahteraan mencakup kesehatan mental dan fisik. Pengurangan beban ekonomi melalui jaminan kerja bagi KK akan menurunkan risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, keterlibatan KK dalam pendidikan keluarga memastikan anak-anak tumbuh dengan bimbingan yang tepat, mengurangi beban sosial kota di masa depan.

5. Penggunaan Sumber Daya yang Bertanggung Jawab (Responsible Resource Use)

Strategi anggaran Jakarta harus bergeser dari paradigma bantuan sosial (bansos) murni menuju akses pekerjaan bagi usia produktif.

- **Bansos Tetap untuk yang Rentan:** Bagi keluarga yang benar-benar tidak ada lagi anggota yang mampu bekerja, termasuk para lansia, negara wajib hadir memberikan penghidupan dasar secara layak. Ini bukan belas kasihan, melainkan penghormatan terhadap hak hidup bermartabat.
- **Jaminan Kerja untuk KK Produktif:** Anggaran negara digunakan untuk menciptakan ekosistem kerja, bukan sekadar memberi uang tunai yang hanya menenangkan sementara namun tidak memulihkan martabat. Membangun martabat berarti memberikan peluang bagi setiap keluarga untuk berdiri tegak.

6. Pelestarian Lingkungan (Preservation of Environment)

Lokalisasi pekerjaan di tingkat kelurahan dan kecamatan secara otomatis mengurangi beban transportasi harian. Penurunan jumlah kendaraan di jalan raya akan berdampak langsung pada kualitas udara Jakarta. Kota yang lestari adalah kota di mana warganya tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan dan bisa lebih banyak berada di rumah bersama keluarga.

Mengatasi Masalah Perkotaan melalui Penguatan KK

Jakarta menghadapi tantangan unik seperti eksploitasi anak dan prostitusi. Penanganannya tidak bisa hanya dengan razia atau hukuman. Akar masalahnya harus dicabut: kemiskinan dan ketidakpedulian negara terhadap keluarga.

Jika seorang kepala keluarga memahami tanggung jawab moral dan memiliki pekerjaan, peluang eksploitasi terhadap anggota keluarganya akan menyusut drastis. Negara juga harus tegas: jika anak di bawah umur terlibat dalam masalah sosial, orang tua wajib mendapatkan pembinaan agar dapat memperbaiki pola asuh mereka. Sedangkan bagi predator atau pelaku perdagangan manusia, hukum harus ditegakkan tanpa kompromi.

Strategi Taktis Menuju 202G

Untuk mewujudkan transformasi ini, Pemerintah Provinsi DKI perlu mengadopsi beberapa langkah strategis:

1. Sistem Koneksi Aktif: Membangun *platform* digital yang secara otomatis mencocokkan profil KK yang menganggur dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dalam radius 5-10 km dari rumah mereka.
2. Kurikulum Mandatory untuk KK: Mewajibkan partisipasi dalam modul "Pendidikan Ketahanan Keluarga" sebagai prasyarat akses jaminan kerja atau insentif ekonomi daerah.
3. Insentif Usaha Berbasis Wilayah: Memberikan kemudahan pajak bagi perusahaan yang membuka unit usaha di wilayah pemukiman padat atau mempekerjakan warga lokal.
4. Audit Martabat Keluarga: Mengalihkan indikator kesuksesan dari sekadar PDB per kapita menjadi "Indeks Martabat Keluarga", yang mengukur tingkat partisipasi kerja KK dan kualitas waktu asuh anak.

Membangun Jakarta dengan Kerja dan Cinta

Jakarta pasca-IKN adalah kanvas kosong yang siap dilukis dengan paradigma baru: Negara yang Menghidupkan Keluarga. Kita tidak lagi cukup hanya mencatat angka kemiskinan; kita harus menghapusnya dengan memberikan pekerjaan dan memulihkan cinta di dalam rumah.

Negara yang kuat bukanlah negara yang membangun gedung-gedung tertinggi, melainkan negara yang memastikan tidak ada satu pun keluarga yang harus menjual kehormatan demi sesuap nasi. Kemajuan sejati tidak diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari seberapa banyak keluarga yang mampu berdiri tegak tanpa kehilangan nilai dan martabatnya.

Mari kita bangun Jakarta di mana setiap rumah menjadi ruang harapan, di mana setiap ayah dan ibu bekerja dengan kepala tegak, dan di mana setiap anak tumbuh dalam dekapan cinta dan nilai-nilai luhur. Jika setiap keluarga dihidupkan, maka Jakarta akan hidup selamanya sebagai mercusuar peradaban dunia.

Referensi Utama:

- *Andreas, H., et al. (2023). Understanding Land Subsidence in Jakarta Metropolitan Area: Data and Monitoring. Institute of Technology Bandung (ITB).*
- *Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (202c, 5 Februari). Profil Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta September 2025.*
- *Bank Indonesia. (2025). Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV 2025: Akselerasi Ekonomi dan Digitalisasi Pasca-Pandemi.*
- *IQAir. (202c). World Air Quality Report: Jakarta Real-time Air Quality Index (AQI).*
- *Brookings Institution. (2018). Capital Relocation and Urban Economic Transformation: Lessons from Rio de Janeiro and Lagos. Global Economy and Development Program.*
- *International Organization for Standardization. (201c). ISO 37101:201c Sustainable development in communities — Management system for sustainable development with requirements for use.*
- *Kazakhstan Institute for Strategic Studies. (2022). The Evolution of Almaty as a Cultural and Science Hub Post-Astana Transition.*
- *Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 80.*
- *World Bank. (2025). East Asia and Pacific Economic Update: Poverty and Equity Brief - Indonesia. World Bank Group.*